

**PERSFEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
JACKPOT PADA KOLAM PEMANCINGAN**

(Studi Kasus Di Desa Kegeringan, Kecamatan Batu Brak
Kabupaten Lampung Barat)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**REDHO FIRDAUS
1421030131**

Program Studi: Muamalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**PERSFEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
JACKPOT PADA KOLAM PEMANCINGAN**

(Studi Kasus Di Desa Kegeringan, Kecamatan Batu Brak
Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**REDHO FIRDAUS
1421030131**

Program Studi: Muamalah

**Pembimbing I: Dra. Firdaweri.M.H.I
Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

Di zaman modern ini banyak di temui berbagai macam kegiatan ekonomi, baik dari segi industri perikanan dan pertanian yang juga banyak cara dan jenis segala macam transaksi di bidang tersebut. Salah satunya pemancingan di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Di desa ini terdapat pemancingan yang memakai sistem jackpot atau sistem hadiah, sistem jackpot ini adalah seluruh pemancing memperebutkan jumlah ikan terbanyak guna untuk mendapatkan jackpot atau hadiah yang di dapatkan dari pemancing yang kalah. Oleh sebab itu penulis tertarik memecahkan masalah melalui penulisan skripsi yang berjudul perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Jackpot di Kolam Pemancingan (studi kasus di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).

Dengan rumusan masalah, bagaimana pelaksanaan pemancingan sistem jackpot di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Dan bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pemancingan sistem jackpot yang terjadi di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mungkin tentang sistem jackpot yang terjadi di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Dan ingin mengetahui sejauh mungkin tentang ketetapan Hukum Islam mengenai pemancingan sistem jackpot tersebut.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di pemancingan sistem jackpot di desa kegeringan dengan metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara interview dan observasi. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif analitis yaitu menggambarkan tentang sistem yang ada di pemancingan tersebut yaitu pemancingan sistem jackpot. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dalam perspektif Hukum Islam dengan pola deduktif.

Bedasarkan hasil penelitian di temukan bahwa Pelaksanaan akad yang ada di pemancingan tersebut terdapat akad terlarang karena adanya unsur perjudian di dalamnya . karena yang dijadikan alat perjudian hasil ikan yang mereka pancing ,barang siapa yang mendapatkan ikan terbanyak maka ialah pemenangnya , dan dari setiap pemancing yang kalah akan membayar kepada pemancing yang menang tergantung jumlah ikan yang di dapat dengan jumlah Rp 50.000 per ekor nya untuk jackpot/hadiah tersebut .Dalam Hukum Islam perjanjian yang diperbolehkan adalah tanpa adanya perjanjian perjudian di dalamnya.



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Surahman Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMANCINGAN
SISTEM JACKPOT**

Nama : **Redho Firdaus**
NPM : **1421030131**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Jurusan : **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam
sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 6 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Firdaweri.M.H.I.


Eti Karini, S.H., M.Hum.

NIP. 195509191982032004 NIP. 197308162003122003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Mu'amalah


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANCINGAN SISTEM JACKPOT** di susun oleh **Redho Firdaus NPM 1421030131 Jurusan Muamalah**. Telah di ujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 September 2018

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

Penguji I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji II : Dra. Firdaweri, M.H.I

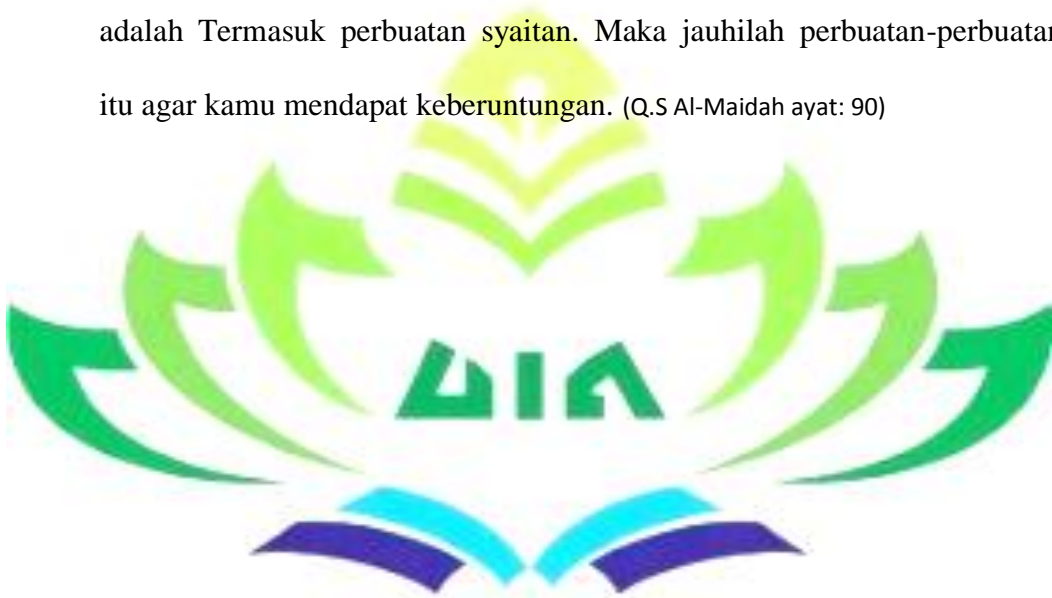
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah ayat: 90)



PERSEMBAHAN

Marilahkitapanjatkan doa dan rasa syukur kehadiran allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sertajunjungan tinggi kepada nabi Muhammad SAW.Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat aku sayang dan aku cinta :

1. Kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi dan cintai Tn. Marwazidan Ny. MardiahTerimakasih telah memberiku semangat, perhatian, kasih sayang, dan membesarkanku, mendidikku dan selalu mengiringi langkahlangkahku serta doa yang tulus dan mendukung semua yang terbaik untuk putranya.
2. Untuk adikku tersayang Rico aji akfila, Aang robiansyah dan Rickyficardoyang selalu ada buat saya dalam memberikan semangat, motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Redho firdaus dilahirkan di Dipasena, pada tanggal 19 desember 1995.

Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Marwazi dan Ibu Mardiah. Penulis mulai menempuh Pendidikan formal tingkat dasar dimulai di SDN 2 Liwa kecamatan balik bukti kabupaten lampung barat pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 28 Bandar Lampung tahun 2007 dan selesai pada tahun 2009, dan melanjutkan Pendidikan di pondok pesantren al-fatah natar lampung selatan pada tahun 2010 dan selesai tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di universitas Teknokrat, lalu tahun 2014 melanjutkan Pendidikan di UIN radenintanlampung pada fakultas syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah).

Bandar Lampung, 18 Agustus 2018

Penulis,

Redho Firdaus
NPM 1421030131

KATA PENGANTAR

Assalalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah- Nya, sehingga skripsi dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Jackpot Di Kolam Pemancingan* “ (Studi pada Desa kegeringan kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar- besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan- kesulitan mahasiswa;
2. Dr. H. A. Khumedi Ja'far., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah

3. Dra.Firdaweri.M.H.I selaku pembimbing I dan Eti Karini,S.H.,M.Humselaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. *Someone special* Putri Ulandari yang selalu menanti keberhasilanku, selalu mengingatkanku untuk membahagiakan kedua orang tuaku, membantuku menyelesaikan skripsi ini dan selalu setia mendengarkan keluh kesah ku.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum;

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain- lain;

7. Almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah- mudahan betapapun kecilnya skripsi ini,

dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu- ilmu keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 30 Juni 2018
Penulis

Redho Firdaus
NPM 1421030131



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A.Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam.....	
1. Pengertian Akad	10
2. Rukun Dan Syarat Akad.....	13
3. Terbentuknya Akad.....	16
4. Macam Macam Akad	17
5. Prinsip-Prinsip Akad	19
6. Berakhirnya Akad	19
B. Perjudian Dalam Pandangan Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Perjudian	21
2. Unsur-Unsur Perjudian	23
3. Illat Hukum	26
4.Illat Hukum Judi	34

BAB IIIHASIL PENELITIAN

A. Profil Di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten lampung Barat.....	38
B. Pelaksanaan Pemancingan Sistem Jackpot Di Desa Kegeringan	52
C. Pandangan Masyarakat Desa Kegeringan Terhadap Pemancingan	

Sistem Jackpot.....	55
---------------------	----

BAB IV ANALISA DATA

A. Pemancingan Sistem Jackpot Di Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	59
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemancingan Sistem Jackpot di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Jackpot di Kolam Pemancingan (Studi Kasus KegeringanKec. Batu Brak Kab Lampung Barat). Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Perspektif Hukum Islam

Perspektif yaitu sudut pandang atau pandangan .¹ Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (Panjang, Lebar, dan tingginya) sudut pandang atau pandangan .²

¹Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: 1991), h. 106

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Surabaya: Arkola), h. 864

Hukum Islam adalah ungkapan bahasa Hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok Hukum yang tercakup dalam wilayah kajian Hukum Islam. Secara umum dalam ungkapan keseharian sering juga dinyatakan dengan sebuah Syari'ah.³

2. Jackpot Di Kolam Pemancingan

Jackpot Menurut kamus besar bahasa Indonesia jackpot bisa di artikan Hadiah, kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan.⁴ Adapun hadiah berasal dari kata *Hadi* terambil dari akar kata yang terdiri darihuruf-huruf ha'dal, dan ya. Maknanya berkisar padahal Pertama, Tampil kedepan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *hadi* yang bermakna petunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan denganlemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.⁵

Kolam pemancingan adalah sarana untuk seseorang menyalurkan hobinya terutama kaum pria yang memiliki hobi dan olahraga memancing. kolam pemancingan itu dibuat agar seseorang lebih mudah menyalurkan hobi memancing tanpa harus pergi ke laut atau ke sungai. Di samping itu bagi pemilik kolam bisa mendapatkan sesuatu dari penggemar ataupun seseorang yang memiliki hobi memancing.

³Bunyana solihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta, Total Media, 2016, h.9

⁴ Sahabuddin et al. *Ensiklopedia Al-quran: Kajiankosa kata*, Jakarta:Lenterahati, 2007, 261.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, et al.*EnsiklopediaHukumIslam*, Jakarta:IchtiarBaru Van Hoeve,1996, h. 540

3. Desa Kegeringan

Desa kegeringan adalahartinya “suka” Karena awalnya berpindah pindah dan akhirnya menetap, berarti masyarakat suka sehingga daerah tersebut diberi nama kegeringan yang artinya suka.

4. Alasan Penelitian

Alasan penulis mengadakan penelitian karena daerah tersebut adalah dekat dengan keluarga dan rumah asli peneliti.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Saat ini banyak sekali bisnis atau usaha yang memenuhi syariat Islam dana dan juga usaha yang Akadnya memenuhi syariat Islam,akan tetapi cara memanfaatkannya berbeda sehingga menjadi pertimbangan bagi penulis untuk mengangkat judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemancingan Sistem Jackpot” karena di kolam pemancingan tersebut terdapat sistem jackpot dimana hadiah bisa berupa uang. Dan uang tersebut di dapat dari para pemancing lainnya , sistem jackpot ini menguntungkan bagi pemenang dan sangat merugikan bagi yang kalah . karena ikan yang di dapat di pertaruhkan, setiap ikan di taruhnya adalah Rp 50.000, oleh sebab itu permasalahan ini akan di bahas lebih mendalam . bagaimanakah Hukum Islam memandang akad perjanjian tersebut dan apakah ada unsur *masyir* di kolam pemancingan tersebut .

2. Alasan subjektif,

Ditinjau dari bahasan, maka skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang ini banyak di jumpai permainan yang menjanjikan berbagai macam hadiah. Permainan tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melalui media elektronik (misalnya media internet) maupun media cetak. Dengan berbagai macam dalil yang dilontarkan para pemainnya bahwa hiburan. Akan tetapi kenyataan nya permainan tersebut tidak sesuai Syari'at Islam karna dipergunakan permainan tersebut mengandung unsur perjudian di dalamnya, artinya sering di jumpai di masyarakat, baik di lingkungan tempat tinggal, di pasar, bahkan di kolam pemancingan. Permainan ini dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Seperti yang terjadi di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, di Desa tersebut terdapat pemancingan dengan sistem jackpot. Jackpot menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah Alat judi atau bisa di artikan juga sebagai Hadiah⁶. Yang di jadikan jackpot disini ialah uang taruhan yang di ambil dari pemancing yang kalah, yang di perebutkan untuk mendapatkan jackpot disini ialah ikan yang di pancing, di pemancingan sistem jackpot yang terjadi di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat pemilik

kolam pemancingan tersebut hanya menjual ikan kepada pemancing yang akan melakukan akad dengan harga ikan

⁶tim penyusun pusat kamus, *kamus besar bahasa indonesi (kbbi)*, h. 49.
yang cukup mahal, ikan yang di berikan kepada setiap pemancing hanya 5 ekor saja, kemudian para pemancing berebut ikan tersebut , Bagi yang mendapatkan ikan terbanyak maka dia yang berhak mendaptkan jackpot tersebut, pemancing yang kalah setiap orang akan membayar kepada pemancing yang menang dengan jumlah Rp 50.000 per ikan tergantung jumlah yang di dapatkanya.

Dalam masyarakat, melakukan akad (perjanjian) sudah menjadi kebiasaan demi mencukupi kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sesuai dengan ketentuan ketentuan Hukum Islam. Sekalipun mencari hiburan di perbolehkan, akan tetapi islam juga melarang sebuah permainan yang mengandung unsur maysir di dalamnya. Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan serta solusi agar para pemancing menyalurkan hobi nya tanpa ada unsur perjudian di dalamnya. Sedangkan sistem jackpot tidak jelas antara kejadian transaksi sistem jackpot di desa tersebut dengan teori Hukum Islam terjadi kebengangan atau kesamaan, oleh sebab itu membuat penulis tertarik menyelsaikan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemancingan Sistem Jackpot yang di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pemancingan Sistem Jackpot ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem jackpot di kolam pemancingan yang terjadi di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
 - b. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum islam terhadap sistem jackpot di kolam pemancingan di Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, untuk sebagai pengetahuan khususnya bagi penulis secara pribadi dan menjadi sumber wacana yang berkaitan dengan Hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan informasi atau output bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Islam khususnya Muamalah.
 - b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi para pemancing tersebut agar tidak mengikuti sistem jackpot di

kolam pemancingan tersebut agar tidak merugikan satu pihak dan pihak lainnya menyalurkan hobi memancing bisa dengan cara memancing di tempat yang tidak merugikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian dalam kanca kehidupan sebenarnya yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁷ Selain menggunakan *fieldresearch* penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini sedang

terjadi. Peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun fakta-fakta.⁸



⁷Hadi Sutrisno, *Metode Research*(Yogyakarta: UGM, 2002), h. 142

⁸*Ibid.*, h. 43

2. Sumber Data

Secara garis besar sumber data tersebut dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada petugas dan pengelola kolam pemancingan Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Tentang sistem jackpot di kolam pemancingan.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang diambil dari buku-buku dan catatan-catatan tentang apa saja yang berkaitan dengan judul penelitian ini atau tentang sistem jackpot di kolam pemancingan, dan di dapat dari koran, majalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti. Yakni wawan cara dengan pemancing, dan pemilik kolam pemancingan tersebut.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.⁹

Pengamatan langsung observasi merupakan pendekatan untuk pengukuran, observasi dalam hal ini yaitu pengamatan indera, adapun pengamatan yang digunakan terhadap sistem jackpot di kolam pemancingan di Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan secara terintegrasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁰ Yang objeknya adalah manusia atau segala sesuatu yang dipengaruhi oleh manusia karena dengan cara seperti ini peneliti akan lebih mendalam menjejaki objek yang akan diteliti.

⁹SuharsimiArikunto,*ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek*,(Jakarta:PT.A sdi Mahasatya, 2002), h. 132

¹⁰Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad (perikatan, perjanjian dan permufakatan).¹ Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam. Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:²

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam Al-quran:

﴿الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنْ وَاتَّقَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ أَوْفَىٰ مِنْ بَلَىٰ﴾

¹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), h. 97

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.13

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”(Q.S.Ali-Imran 3:76)³.

Tafsir dari surat ali-imran ayat 76 yakni, janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yakni:

لَكُمْ يُتْلَىٰ مَا إِلَّا لَنْعَمِ هِمَّةٌ لَّكُمْ أَهْلَتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا أَنْتُمْ الصَّيْدُ مُحَلَّىٰ غَيْرَ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”(QS. Al-Maidah:1).

Tafsir surat al-maidah ayat 91 adalah Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan

orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain,¹



³Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Diponogoro, 2014), h. 59

¹ Hasani ahmad said & Faturrahman Rauf, Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN RIL VOL.XXI, No. 3 juni 2015), hal 495

baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.⁴ Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi akad, sebagai berikut:

1. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁵
2. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁶

Ibnul Arabi rahimahullah menyatakan, “Ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allâh SWT, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan.

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁷

⁴Sohari, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)h. 42

⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h. 23

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.75

⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2003), h.101

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.⁸ Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.⁹ Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.¹⁰

2. Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka

⁸*Ibid.*, h.102

⁹*Ibid.*, h.104

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali, 2010) h. 68

timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad.

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi

oleh aqid,¹¹ antara lain:

- a. Ahliyah, keduanya memiliki kecakapn dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
- b. Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.

Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h.54

- 2) *Mauqudala* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhualaqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad
- 4) *Sighat al aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-aqd*¹² ialah:

- a) *Sighat al-aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.

Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

2. Syarat Aqad


Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad¹³ yaitu Kedua orang yang melakukan aqad cakap

¹² Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),h. 43

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : PT Raja Grafindo,2005) h.

44

bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.

- 
- a. Akad dijadikan objek dapat menerima hukumnya
 - b. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
 - c. Aqad tidak dilarang oleh syara'.
 - d. Aqad dapat memberikan faedah.
 - e. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
 - f. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabulmakabatal.

3. Terbentuknya Aqad

Diperlukan syarat-syarat agar unsur-unsur yang membentuk aqad dapat berfungsi membentuk aqad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun aqad ini disebut syarat terbentuknya aqad (*syuruth al-in''iqadd*) yaitu:

- a. Tamyiz
- b. Berbilang pihak atau pihak-pihak yang beraqad (*at-ta''adud*)
- c. Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan)
- d. Kesatuan majlis aqad
- e. Objek aqad dapat diserahkan
- f. Objek aqad tertentu atau dapat ditentukan
- g. Objek aqad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan memiliki/ mutaqawwin dan mamluk)
- h. Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'.

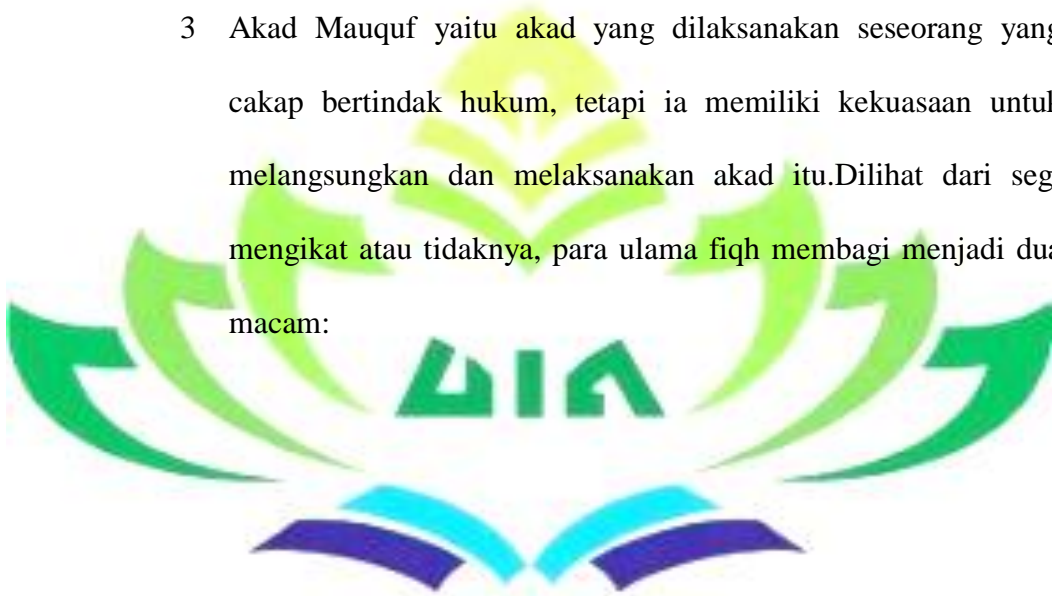
4. Macam-macam Aqad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa aqad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:¹⁴

Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

- a. membagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu:

- 1 Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2 Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.
- 3 Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:



¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h.

1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.

2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam *akad al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi 2:

a. **Akad *Tabarru'*** : Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk

dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru' tersebut.

Akad Tijarah: Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.¹⁵

5. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kebebasan Berkontrak
- b. Prinsip Perjanjian itu Mengikat
- c. Prinsip Kesepakatan Bersama
- d. Prinsip Ibadah
- e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi Prinsip Kejujuran (Amanah)

6. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila¹⁶

¹⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali, 2010)
h. 35

¹⁶*Ibid.*, h.109

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila kad itu sifatnya tidak mengikat
- b. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
 - a. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya adalah akad sewa menyewa.

B. Pengertian, Illat Hukum dan Unsur-unsur Perjudian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjudian

Maisir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dll. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yassar* yang artinya keharusan. Kebutuhan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir*/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir*

berasal dari kata *yusr* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena *maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.¹⁷

Ada lagi yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasaar* (يَسَارٌ) yang artinya kaya, dengan analisa bahasa karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnyamenjadi kaya. Adapun yang berpendapat bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusr* yang artinya membagi-bagi daging onta. Hal ini sejalan dengan sifat *maisir*/judi yang ada pada masa Jahiliyyah yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan; di mana mereka membagi-bagi daging onta menjadi dua puluh delapan bagian. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, jadi

¹⁷Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an IIQ), 1987), h. 24-25.

qimardan maisir artinya sama. *Qimar* sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.¹⁸

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.¹⁹

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya “Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maisir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

¹⁸*Ibid.*, h. 25

¹⁹Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, h. 297-298.

Menurut Imam Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Iqna'* juz II hal 286, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kudakedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.²⁰

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

2. Unsur-unsur Perjudian

Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik jarimah. Unsur-unsur delik itu ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum tersebut adalah:

Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formiil). adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil). Pelaku adalah mukallaf

(unsur moral).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah perjudian, ialah:

- a. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.

Rasyid Ridha dan at-Tabarsi sepakat menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan termasuk ke dalam pengertian maisir yang dilarang syara'. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy permainan yang mengandung unsur untung-untungan, termasuk judi, dilarang syara'.²⁵

Berdasarkan rumusan judi di atas, maka jika ada dua kesebelasan sepak bola yang bertanding yang oleh sponsor akan diberikan hadiah kepada yang menang, ini bukan judi, karena tidak ada dua pihak yang bertaruh.

Contoh lain: dua pemain catur yang mengadakan perjanjian, siapa yang kalah membayar kepada yang menang suatu jumlah uang, jugadinamakan berjudi, karena terdapat unsur taruhan di dalamnya. sebab

pertandingan yang merupakan adu. Pada prinsipnya lomba berhadiah seperti bergulat, lomba lari, badminton, sepak bola, atau catur diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa.

Dan mengenai uang hadiah yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, kekuatan/keterampilan/kepandaian.²⁶ jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor nonpemerintah untuk para pemenang.
- b. Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dikalahkan oleh lawan yaitu.

Jika uang/hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai hadiah, yang akan mengambil hadiah itu, jika jagonya menang; tetapi ia tidak harus membayar, jika jagonya kalah.²¹

Tetapi sekarang orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila uang/hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh: siapa yang kalah, membayar Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi.

²¹Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, h. 148.

3. Illat Hukum

A. Pengertian Illat Hukum

Illat ialah suatu sifat yang ada pada ashal (al-ashl) yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal (al-ashl) serta untuk mengetahui hukum pada fara' (al-far') yang belum ditetapkan hukumnya, seperti menghabiskan harta anak yatim merupakan suatu sifat yang terdapat pada perbuatan memakan harta anak yatim yang menjadi dasar untuk menetapkan haramnya hukum menjual harta anak yatim.²²

Para ulama sepakat bahwa Allah SWT membentuk hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Kemaslahatan itu adakalanya dalam bentuk mengambil manfaat (jaibul manafi') dan adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya (dar-ul mafasid). Kedua macam bentuk hukum itu merupakan tujuan terakhir dari pembentukan hukum yang disebut hikmah hukum.

Hikmah hukum berbeda dengan illat hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam kerusakan. Illat hukum suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.

²²Nasrun Harun, *Ushul Fiqih 1*, hal. 81

Illat merupakan sifat keadaan yang melekat pada dan mendahului peristiwa/pebuatan hukum yang terjadi dan menjadi sebab hukum. Sedangkan hukmah adalah sebab positif dan hasil yang dirasakan kemudian setelah adanya peristiwa hukum. Sebagai contoh ialah: Seorang musafir boleh mengqashar shalatnya, seperti mengerjakan shalat Zhuhur yang empat raka'at menjadi dua

raka'at dan sebagainya. Hikmahnya ialah untuk menghilangkan masyaqqah (kesulitan) atau kemadhartan. Hikmah ini hanya merupakan dugaan saja dan tidak dapat di jadikan dasar atau tindaknya hukum, sedangkan illat adalah suatu yang nyata dan pasti, seperti safar (dalam perjalanan). Illat adalah yang membatasi (mendefinisikan) hukum dan illat itu disebut hubungan hukum, sebabnya dan tandanya.²³

Mengenai illat hukum dan sebab hukum, ada yang tidak membedakannya, mereka menyamakan arti kedua istilah tersebut. Sebagian ulama lagi membedakannya, sekalipun perbedaan itu sangat sedikit. Menurut

mereka illat hukum dapat dicapai oleh akal, sedang sebab hukum ada yang dapat dicapai akal dan ada yang sukar dicapai oleh akal.

Sebenarnya untuk membedakan pengertian kedua istilah itu sukar dilakukan karena ada suatu peristiwa yang dalam peristiwa itu illat dan sebabnya sama. Seperti tergelincir matahari pada siang hari merupakan

sebab seorang muslim wajib mengerjakan shalat dzuhur, demikian pula terbenamnya



²³*Ibid*hal. 101

matahari pada hari terakhir bulan sya'ban merupakan sebab kaum muslimin besoknya mengerjakan puasa bulan Ramadhan.

Tetapi terbenam dan tergelincirnya matahari itu bukanlah illat hukum karena kedua sebab itu tidak terjangkau oleh akal. Lain halnya dengan safar (dalam perjalanan) disamping ia merupakan illat hukum juga merupakan sebab hukum yang membolehkannya untuk mengqashar shalat.

Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa sebab itu lebih umum dari illat, dengan perkataan lain bahwa semua illat dapat dikatakan sebab, tetapi belum tentu semua sebab dapat dikatakan illat.

B. Macam Macam Illat Hukum

Illat hukum dibagi menjadi tiga macam: 1. Illat yang ditetapkan oleh syara' 2. Illat yang ditetapkan berdasarkan masalah yang diperkirakan ada pada illat tersebut 3. Illat yang diperkirakan adanya pada ketetapan hukum tersebut.

Adapun illat yang ditetapkan oleh syara' terdiri dari empat macam:

1. Al-Munasibul Mu'sir
2. Al-Munasibul Mulaim
3. Al-Munasibul Mulga
4. Al-Munasibul Mursal

1. Al-Munasibul Mu'sir:

Ahila illat yang ditunjuk oleh syara' bahwa illat itulah yang menjadi illat hukum yang ditetapkan, baik yang ditunjuk secara langsung atau tidak langsung. Umpamanya dalam ayat.

2. Al-Munasibul Mu'sir

Illat yang tidak dijelaskan dalam nash sebagai illat hukumnya, Namun dalam nash lain disebutkan illat bagi hukum yang serupa. Contohnya seperti yang diterangkan dalam hadits bahwa gadis yang Belum mencapai usia balig harus dinikahkan oleh walinya, Namun tidak dijelaskan illat sebenarnya apakah karena gadisnya atau karena Belum cukup balig, karena keduanya dapat dijadikan sebagai illat.

Menurut madzhab hanafi yang menjadi illat disini karena Belum sempurna akal, sama hal dengan anak Belum balig yang mempunyai harta harus diletakkan dibawah pengawasan. Karena itu setiap orang yang Belum sempurna akalnya atau hilang akalnya diqiyaskan dengan gadis yang Belum balig, seperti perempuan gila, orang yang mabuk dan janda yang Belum mencapai usia baligh.

3. Al-Munasibul Mulga

Illat yang diperkirakan akan membawa kebaikan namun ditemui dalil syara' yang lain yang memberi petunjuk bahwa illat itu dihapuskan. Umpamanya

hukuman bagi orang yang bersenggama pada siang hari di bulan ramadhan sedangkan ia memilih berpuasa maka hukumannya yang pantas adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena hukuman seperti itu dapat membatasi jumlah pelanggaran. Namun syara' mewajibkan kepadanya secara berurutan melaksanakan hukuman: 1. memerdekakan budak 2. berpuasa dua bulan berturut-turut 3. memberi makan enam puluh orang miskin. Hukuman ini berlaku bagi siapa saja orang miskin maupun orang kaya.

4. Al-Munasibul Mursal

ialah sifat menurut anggapan mujtahid sebagai illat hukum, Namun syara' tidak menetapkan ini sebagai illat tapi tidak juga menolaknya.

C. SYARAT-SYARAT ILLAT

Para ahli usul sepakat bahwa syarat-syarat illat adalah :

1. Memiliki sifat yg jelas

Illat itu harus berupa sifat yg jelas, yakni dapat disaksikan oleh salah satu panca indra, sebab illat itu gunanya menerapkan hukum pada cabangnya, dapat dilihat pada ashalnya seperti bisa dilihat pada cabangnya. Jika illat itu bukan sesuatu yg tampak jelas, maka tidak mungkin dijadikan sebagai tanda dan petunjuk.²⁴

2. Illat itu harus berupa sifat yg sudah pasti (mundhobit)

Pada syarat kedua ini yg dimaksudkan adalah suatu illat mempunyai hakikat yg nyata lagi tertentu dan tidak berbeda beda karena perbedaan situasi

dan kondisi. Contoh bepergian adalah sifat yg pasti yg memperbolehkan tidak



²⁴Abdul Wahab Khallaf, *'ilmu ushul fiqih*, Kairo : Darul Qalam, 1978, hal. 63

berpuasa bulan romadhon, maka kita tidak boleh menjadikan masyaqqoh (kepayahan) sebagai illat karena kepayahan adalah sifat yg tidak pasti,

berbedabeda sesuai dengan perbedaan kendaraan, situasi dan pribadi. Kadang payah menurut sebagian orang dan bukan menurut sebagian yg lain.

3. Suatu illat tidak hanya terdapat pada ashal saja.

Illat merupakan sifat yg dapat di terapkan pada beberapa masalah selain pada ashal itu, karena maksud mencari illat pada ashal itu ialah untuk menerapkannya pada cabang, ketika suatu illat hanya diperoleh pada ashal saja, maka tidak dapat dijadikan asas qiyas. Contoh beberapa ketentuan hukum yg khusus berlaku bagi rosulullah tidak dapat dijadikan atas qiyas, misalnya kebolehan bagi rosulullah menikahi wanita lebih dari empat orang, dan istri istri nabi tidak boleh dinikahi setelah nabi wafat, karena tidak sah mengiaskannya dikarenakan illatnya adalah yg demikian itu hanya berlaku khusus bagi nabi.

4. Suatu sifat yg tidak dianggap (dilalaikan) oleh syari'.

Yang dikehendaki dari syarat ini adalah, syari' tidak menetapkan hukum yg tidak sesuai dengan tuntutan tersebut. Contohnya adalah anak laki-laki dan wanita sifatnya sama yaitu sama-sama anak, namun dalam warisan sifat ini dilalaikan oleh syari'at, dimana anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat anak wanita. Contoh lain adalah bila seorang ayah membunuh anaknya dengan sengaja, maka secara qiyas si ayah berhak dibunuh sebagai qishos karena illatnya adalah pembunuhan secara sengaja, namun illat ini dilalaikan oleh syari'at.

5. Ilat harus berupa sifat yg sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum.

Dengan Pengertian bahwa dugaan keras illat itu harus sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti memabukkan adalah hal yg sesuai dengan hukum haram minum khomer, karena dalam hukum itu terkandung suatu hikmah yaitu memelihara akal dengan menghindarkan diri dari mabuk. Pembunuhan disengaja adalah sesuai dengan keharusan adanya qishos, karena dalam qishos itu terkandung suatu hikmah hukum, yaitu untuk memelihara kehidupan manusia. Maka tidak boleh membuat illat dengan sifat yg tidak sesuai dengan hikmah hukum, seperti illat keharaman khomer karena berupa sesuatu yg mengali, berwarna merah dan dituangkan kedalam gelas.

D. Pembagian Illat Hukum

Para ulama ushul fiqih membagi 'illat itu menjadi beberapa segi, diantaranya adalah segi cara mendapatkannya dan bisa tidaknya 'illat itu diterapkan pada kasus hukum lainnya.

Dari segi cara mendapatkannya, Illat itu menurut ulama ushul fiqih, ada dua macam yaitu:²⁵

- a. 'Illah Manshushah adalah 'illat yang di kandung langsung oleh nash. Jadi, apabila dalam nash terdapat 'illat yang menyatakan begini, atau sebab

²⁵*Ibid* hal. 70

begini, atau karena begini, maka sifat itu adalah 'illat yang berdasar nash itu. Seperti firman Allah dalam memberi 'illat terutusnya para Rasul, yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 165: "(Mereka kami Utus)

selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul.

- b. 'Illah Mustabathah adalah 'illat yang digalli oleh para mujtahid dari nash sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Misalnya menjadikan perbuatan mencuri sebagai 'illat bagi hukum potong tangan.

Dari segi cukupnya, illat itu ada 2 macam yaitu:

1. 'Illah Muta'addiyah adalah 'illat yang ditetapkan suatu nash dan bisa diterapkan pada kasus hukum lainnya. Misalnya, 'illat memabukkan dalam minuman khamr juga terdapat pada whisky, karena unsur memabukkan dalam whisky juga ada. Oleh sebab itu, maka antara whisky dan khamr hukumnya sama, yaitu haram diminum.
2. 'Illah Qashirah adalah 'illat yang terbatas pada suatu nash saja; tidak terdapat dalam kasus lain, baik 'illat itu manshushah maupun musthanbathah. Misalnya, Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dan mayoritas ahli kalam menyatakan bahwa 'illat riba dalam memperjual belikan barang yang sejenis adalah nilainya.

4. Illat Hukum Judi

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

لَشَيْطَانٍ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهَا ﴿٩١﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.(QS. Al-Maidah: 90)²⁶

Surat Al-Maidah ayat 91

عَنْ وَيَصْدَكُمْ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ فِي الْبَغْضَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا

مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلِ الصَّلَاةُ وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرُ ﴿٩١﴾

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*,(Bandung: PT Diponogoro, 2014), h.59

Artinya:

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS.Al-Maidah: 91)²⁶

بَنَ أَكْبَرُواثْمُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٌ أَثْمٌ فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنْ يَسْأَلُونَكَ

وَنَلْعَلَّكُمْ الْأَيْتِلِكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوَ قُلْ مَاذَا أَسْأَلُونَكَ نَفْعَهُمَا



Artinya:

”mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”(QS Al-Baqarah: 219)²⁸

²⁷ *Ibid* hal. 59

²⁸ *Ibid* hal. 29

Dari kandungan ayat diatas yaitu surat Al-Baqarah: 219 dan surat Al-Maidah: 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan Perbuatan keji yang diharamkan islam. Keharusan dalam surat Al-Baqarah ayat 219 tidak begitu jelas. Allah SWT secara tegas menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya,

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.Penyebab diharamkannya perbuatan judi di jelaskan Allah SWT dalam ayat 91 yang artinya, “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Dari ke tiga ayat tersebut, para ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal.

1. Judi merupakan dosa besar
2. Judi merupakan perbuatan setan
3. Judi sejajar dengan syirik
4. Judi menanam rasa permusuhan
5. Judi membuat orang malas berusaha
6. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT. Selain lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran islam yang senantiasa memotivasi

umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat.

Dari ayat di atas secara jelas bahwa perbuatan *khamar* dan *maisir* adalah perbuatan setan dan dilarang karena mudharatnya lebih banyak di bandingkan manfaat dari perbuatan tersebut.

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsure perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Dimana pemain tidak lepas dari untung dan rugi. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Yusuf Qawardy dalam buku “Halal dan Haram”, dia mengutip sebuah hadist Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya “Barang siapa berkata kepada kawanya marilah berjudi maka hendaklah ia bersedekah.” Dengan demikian seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dengan mengisi waktu senggang. Sebagaimana tidak di perbolehkan menjadikanya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Kegeringan

1. Sejarah Singkat Pekon Kegeringan

Berdasarkan informasi dan data-data yang terkumpul dari sekertaris pekon dan masyarakat pekon kegeringan, akhirnya dapat saya susun sejarah singkat desa kegeringan ini dalam keadaan yang sangat sederhana, namun mudah-mudahan dapat bermanfaat semua pihak yang memerlukan.¹

Ada pun sejarah pekon kegeringan ini dikumpulkan berdasarkan hasil penjelasan para tokoh tokoh masyarakat desa kegeringan antara lain :

- a. Bapak Yongki
- b. Bapak Dam
- c. Bapak Rohman
- d. Bapak Sofyan hadi

¹Yongki kurniawan, e-mail kepada penulis, 15 april 2018.

Untuk memastikan asal nama kegeringan kami belum dapat menentukan secara pasti yang sebenarnya, namun disini hanya dapat menguraikan apa yang kami dengar dari cerita dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kami simpulkan sebagai berikut :

Suatu nama yang terdengar sangat aneh di telinga. Kegeringan dalam bahasa indonesian itu adalah suka.

kegeringan itu “SUKA”, lalu apa hubungannya desa ini di sebut sebagai pekon kegeringan? Lalu saya tanya dengan masyarakat pekon kegeringan.

Awal mulanya pada tahun 1950 masyarakat tinggal di suatu daerah yang diberi nama kulut, yang artinya kolot. Selanjutnya masyarakat berpindah tempat ke daerah canggu, setelah 4 tahun menetap di canggu masyarakat berpindah tempat lagi di daerah yang di beri nama lom dalam, yang artinya pekon di dalam. Sejak saat itu masyarakat menetap di daerah ini. Karena awalnya berpindah pindah dan akhirnya menetap, berarti masyarakat suka sehingga daerah tersebut diberi nama kegeringan yang artinya suka.

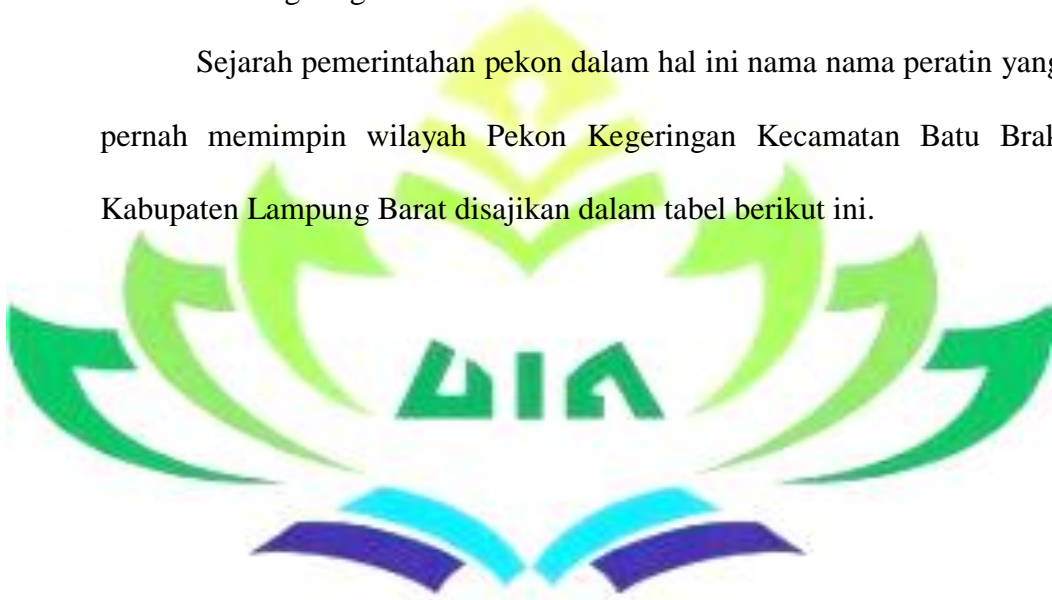
Sampai dengan tahun 1990 Pekon Kegeringan masih merupakan bagian dari Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Utara. Namun sejak tahun 1991, Batu Brak menjadi Kecamatan Pembantu dan pada tahun 1999 menjadi Kecamatan devinitif. Sejak berdirinya kecamatan pembantu

Batu Brak, Pekon Kegeringan merupakan salah satu pekon yang ada di bawah naungannya.

Demikian sejarah singkat terbentuknya serta perkembangan Desa Kegeringan batu brak, berdasarkan keterangan dari tokoh-tokoh dan sesepuh Desa serta data-data yang ada.²

2. Peratin Kegeringan

Sejarah pemerintahan pekon dalam hal ini nama nama peratin yang pernah memimpin wilayah Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat disajikan dalam tabel berikut ini.



²struktur organisasi pekon kegeringan kabupaten lampung barat, 15 april

Tabel 1
Nama Nama Peratin pekon Kegeringan

Periode	Nama Peratin	Keterangan
1960 –	hawi	
67 – 1972	t Jubai	
73 – 1996	ohim	
96 – 1997	nur	
98 – 2003	wanto	
03– 2008	ojuddin	
09– 2014	ojuddin	
15 – 2016	hman	
16 –	yan Hadi	

Sumber: *Monografi* pekon kegeringan kabupaten lampung barat dicatat tanggal 15 april 2018

3. Sejarah Pembangunan Pekon

Secara umum sejarah pembangunan pekon yang telah terlaksana di Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat

disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2
Sejarah Pembangunan Pekon

N	T	Kegiatan Pembangunan	K
1	1	Pembangunan balai pekon	
2	2	Pembangunan jalan pemandian	
3	2	Pembangunan jalan lingkar pekon	
4	2	Pembangunan pemandian umum	
5	2	Rehap pemandian umum	
6	2	Pembangunan Poskamling	
7	2	Pembangunan talut	
8	2	Pembangunan pemandian umum	
9	2	Pembangunan jalan pemangku VI	
1	2	Pembangunan turbin	
1	2	Pembangunan gedung TPA	
1	2	Pembangunan jalan gang pekon	
1	2	Pembangunan Rabat Beton	
1	2	Pembangunan Jalan	
1	2	Pembangunan Jalan	
1	2	Rabat Beton	
1	2	Pembangunan Jalan	

Sumber: *Monografi* pekon kegeringan kabupaten lampung barat dicatat tanggal 15 april 2018

4. Kondisi Geografis

Pekon Kegeringan merupakan salah satu pekon di bawah naungan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Luas wilayah Pekon Kegeringan sekitar 350 Ha, yang terbagi ke dalam lahan permukiman 100 Ha, lahan pertanian/persawahan 50 Ha, lahan perkebunan 200 Ha. Pekon Kegeringan berada 800 m di atas permukaan air laut dengan suhu minimum 20⁰ C dan suhu maksimum 30⁰ C.

Pekon Kegeringan berbatasan dengan, di sebelah utara dengan Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak, sebelah selatan dengan Pekon Suka Bumi Kecamatan Batu Brak, sebelah barat dengan Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak dan di sebelah timur dengan Pekon Pekon Balak Kecamatan Batu Brak.

Jumlah penduduk Pekon Kegeringan sekitar 1.319 jiwa, terdiri dari laki laki sebanyak 650 jiwa dan perempuan sebanyak 669 jiwa, yang tersebar dalam 500 Kepala Keluarga. Penduduk di Pekon Kegeringan tersebar dalam 7 (tujuh) pemangku. Gambaran jumlah penduduk yang ada di Pekon Kegeringan dapat dilihat dalam tabel berikut.⁴

5. Sosial Budaya

"Lain ladang lain belalang", maksudnya adalah lain daerah lain pula kondisi sosial budayanya. Demikian pula halnya yang terjadi di Pekon Kegeringan, dimana dari jumlah penduduk sekitar 1.319 jiwa terbagi ke dalam golongan umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian/pekerjaan, suku/ras maupun agama yang berbeda beda.

³Monografi pekon kegeringan kabupaten lampung barat dicatat tanggal 15 april 2018

⁴yongki, wawancara kepada sekertaris pekon kegeringan kabupaten lampung barat 15 april 2018

Kondisi sosial budaya yang berbeda beda ini dapat dilihat

dalam tabel berikut ini.

Tabel3
Kondisi Sosial Budaya Pekon Kegeringan

N	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pendudukan Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah KK Jumlah laki-laki a. 0 – 15 tahun b. 16 – 55 tahun c. Diatas 55 tahun Jumlah perempuan a. 0 – 15 tahun b. 16 – 55 tahun c. Diatas 55 tahun	 1.367 500 191 386 170 125 340 165	
2	Tingkat Pendidikan Tidak tamat SD TP TA Diploma/Sarjana	 28 120 380 650 120	
3	Mata Pencaharian Buruh Tani Petani Peternak Pengang Pengang Kayu Pengang Batu Penjahit PNS Pensiunan P/I/Polri Pengangkat Pekon Pengrajin	 - 1000 7 20 5 - 1 29 10 - 12 1	

Sumber: *Monografi* pekon kegeringan kabupaten lampung barat dicatat tanggal 15 april 2018

Tabel 4
Kondisi Budaya Agama dan Suku

No	Uraian		Keterangan	
1	A. Agama			
	Islam	1.319		
	Kristen	-		
	Katolik	-		
	Hindu	-		
	Budha	-		
	B. Suku			
	Lampung	1.150		
	Jawa	169		
	Mada	-		
	Lain	-		

Sumber: *Monografi* pekon kegeringan kabupaten lampung barat dicatat tanggal 15 april 2018

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kependudukan

Penduduk yang ada di Pekon Kegeringan sebagian besar masih dalam usia produktif (usia 16 – 55 tahun) baik yang laki laki maupun yang perempuan. Jumlah usia produktif antara yang laki laki dengan perempuan hampir seimbang.

2. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang ada di masyarakat Pekon Kegeringan cukup beragam, hal ini terlihat dengan adanya penduduk yang tidak menamatkan pendidikan SD (Sekolah Dasar) serta ada juga yang sampai dengan menamatkan pendidikan Diploma/Sarjana.

3. Mata Pencarian

Mayoritas mata pencaharian penduduk di Pekon Kegeringan adalah petani. Bidang pertanian yang dijadikan mata pencaharian penduduk yaitu petani kopi. Hal ini terlihat dari sebagian lahan yang ada di Pekon Kegeringan adalah kebun kopi.

4. Agama

Penduduk Pekon Kegeringan mayoritas beragama Islam (Muslim). Karena memang secara turun temurun, penduduk yang ada di Kegeringan menganut agama Islam. Dan hanya beberapa saja yang beragama non Islam, dikarenakan warga masyarakat tersebut merupakan pendatang.

5. Prasarana Dan Sarana Pekon

Prasarana dan sarana merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menunjang kemajuan suatu pekon, baik itu sarana umum, sarana kesehatan maupun sarana pendidikan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan prasarana dan sarana tersebut yang akan memberikan dampak terhadap perekonomian yang berarti kesejahteraan masyarakatnya, serta kesehatan dan pendidikan yang bermutu yang berarti akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Adapun prasarana dan sarana yang telah ada di Pekon Kegeringan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5
Prasarana dan Sarana Pekon

N	Jenis Prasarana dan Sarana Pekon	Jumlah	Keterangan
1	alai Pekon	1	Rusak
2	Gedung Pendidikan A. SMU/MAN B. SMK C. SLTP/MTS D. SD/MI E. TK/PAUD/TPA	- - 1 1 1	
3	an Pekon	2	
4	makaman	1	
5	pangan Olah Raga	1	
6	AB (Prasarana Air Bersih)	1	AM
7	asjid	4	
8	usholla	2	
9	sar Pekon	-	
1	lindes	-	
1	nti PKK	-	
1	skamling	7	
1	mbatan	5	
1	mbangkit Listrik/Penerangan	1	

Sumber: *Monografi* pekon kegeringan kabupaten lampung barat dicatat tanggal 15 april 2018

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sarana Pendidikan yang ada di Pekon Kegeringan yaitu berupa 1 unit gedung SLTP, 1 unit gedung SD dan 1 unit gedung TPA, sementara untuk pendidikan tingkat SMU masyarakat menyekolahkan di luar

pekon, yaitu SMU di Pekon Pekon Balak ataupun di Ibu Kota Kabupaten yaitu di Liwa.

- b. Pekon Kegeringan tidak memiliki pasar tradisional, untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan, masyarakat Pekon Kegeringan datang ke pasar tradisional yang ada di Pekon Kembahang ataupun Pekon Pekon Balak yang merupakan tetangga pekon.
- c. Sarana Kesehatan yang ada di Pekon Kegeringan masih sangat kurang, hal ini terlihat belum adanya gedung Puskesmas. Untuk sarana pemerintahan yaitu balai pekon, Pekon Kegeringan sebenarnya sudah memilikinya. Hanya saja bangunan balai pekon yang ada telah rusak berat dan membutuhkan perbaikan. Sehingga selama ini, aktivitas pemerintahan dilaksanakan di rumah peratin.

6. Pemerintah Umum

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan daya dukung masyarakat itu sendiri terhadap kemajuan suatu pekon. Hal ini bisa melalui pelayanan berbagai sektor, misalnya pelayanan dalam hal mengurus surat surat dokumen kependudukan, pelayanan dalam hal perijinan suatu kegiatan, maupun terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat itu sendiri. Pelayanan terhadap masyarakat termasuk ke dalam pemerintahan umum. Adapun pemerintahan umum yang ada di Pekon Kegeringan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6

Pemerintahan Umum

N	Uraian	Keberada		Keterangan
		A	T	
1	ayanan kependudukan	V		
2	makaman	V		
3	ijinan		V	
4	sar tradisional		V	
5	tentraman dan	V		

Sumber: *Monografi* pekon kegeringan kabupaten lampung barat
dicatat tanggal 15 april 2018

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pelayanan kependudukan di Pekon Kegeringan dilaksanakan setiap waktu, hanya saja pelayanan dilaksanakan di rumah peratin karena balai pekon yang ada telah rusak. Walaupun demikian, hal ini tidak mengurangi dari tugas dan tanggung jawab dari aparat pekon yang ada.
- b. Apabila ada masyarakat yang meninggal dunia, prosesi pemakaman dilakukan secara gotong royong dan prosesi pemakaman dipimpin oleh ulama setempat.
- c. Pelayanan perizinan diberlakukan pada saat ada masyarakat yang akan melaksanakan hajatan dan akan menghadirkan massa dalam jumlah banyak. Hanya saja perizinan yang diberlakukan tidak berupa tulisan, tetapi lisan. Hal ini dikarenakan lingkungan di sekitar pekon relatif kondusif dan aman.
- d. Petugas keamanan dan ketertiban yang ada di Pekon Kegeringan berjumlah 10 orang, yang bertugas pada saat tertentu saja.

Misalkan pada saat ada kunjungan pejabat, ataupun pada saat dilaksanakannya pemilihan umum.

7. Visi Dan Misi Pekon

- Visi Pekon

Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dengan Pengelolaan Hasil BumidanPembangunan Secara Mandiri di Seluruh Wilayah Pekon Kegeringan

- Misi Pekon

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkebunan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana umum yang akan menunjang akses hasil hasil pertanian dan perkebunan
3. Meningkatkan etos kerja
4. Memberdayakan potensi agrobisnis secara optimal

Tabel 7
Daftar Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan kerikil		M3
2	Pasir urug		M3
3	Lahan tegalan		Ha
4	Lahan persawahan		Ha
5	Lahan hutan		Ha
6	Sungai		Km
7	Tanaman perkebunan: Lada, Cengkeh, Kopi dll		Ha
8	Air terjun		M3

Sumber: *Monografi* pekan kegeringan kabupaten lampung barat
dicatat tanggal 15 april 2018

B. Pelaksanaan Pemancingan Sistem Jackpot Di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat

Di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, memiliki lahan pertanian yang sangat subur khususnya untuk bercocok tanam khususnya sayur mayur , kopi dan sebagainya. Pada umumnya masyarakat di Desa Kegeringan melakukan kegiatan sehari hari dengan cara bertani dan buruh tani. Namun tidak semua masyarakat memanfaatkan lahan nya untuk bertani , ada juga yang lahan nya digunakan untuk membuat kolam pemancingan yang berbeda dari yang lainnya yaitu dengan sistem jackpot.

Sistem jackpot di kolam pemancingan adalah perjanjian yang dilakukan oleh beberapa orang untuk melakukan judi dengan cara memancing , gunanya untuk mendapatkan jumlah ikan terbanyak dan uang taruhan sesuai perjanjian dari para pemancing.

Kolam pemancingan menjadi suatu kegiatan bagi masyarakat Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dalam bentuk bidang muamalah. Kolam pemancingan ini sudah berkembang di kalangan masyarakat di pedesaan sudah menjamur sebagai perilaku manusia dalam menyalurkan hobinya degan cara memancing di kolam pemancingan . lahan pemancingan ini di jadikan tempat seseorang melakukan kegiatan judi pancing.

Karena faktor untuk mencari uang, lahan ini digunakan oleh pemilik kolam pemancingan sebagai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan

sehari hari. Satu hal yang unik dari pemancingan di desa kegeringan ini adalah karena masyarakatnya masih awam terhadap Hukum ekonomi syariah atau Hukum Islam, sehingga dipandang secara Hukum Islam agar tidak terjerumus ke dalam transaksi bermuamalah yang dilarang. Ketika masyarakat memahami cara bermuamalah maka setiap pelaksanaannya masyarakat harus mempertimbangkannya

segala sesuatu yang dilakukan itu mempunyai Hukum yang berlaku sehingga mampu memahami cara pandang pelaksanaan sewa lahan yang ada di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

Dalam masyarakat melakukan perjanjian (akad) sudah menjadi kebiasaan demi mencapai suatu kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sesuai ketentuan Islam atau belum, itu menjadi permasalahan sendiri bagi seorang yang mendalami ilmu syari'ah. Seperti yang ada di desa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat , setiap laki laki yang memiliki hoby memancing, mereka pasti akan pergi memancing di kolam pemancingan.

menurut pemancing sistem jackpot di Desa Kegeringan, Sistem pemancingan jackpot adalah memperebutkan ikan yang dipancing dengan jumlah terbanyak guna nya untuk mendapatkan uang taruhan dan ikan yang diperoleh. pemilik kolam pemancingan jackpot tersebut hanya menjual ikan tersebut kepada para pemancing, setiap pemancing memiliki jatah 5 kg . dan dari 5 kg ikan berjumlah 5 ekor ikan , pemancing ada 6

orang dari setiap 6 orang tersebut akan di beri jatah 5 kg, mereka akan membayar ke pemilik kolam pemancingan sebesar Rp.250.000 per orang untuk membeli ikan tersebut. Kemudian ikan yang di beli 6 orang tersebut akan di lepas di kolam sebanyak 30 ekor. Pemancing 1 dan pemancing ikan lainnya akan berebut ikan tersebut. bagi yang mendapatkan ikan lebih banyak maka pemancing tersebut adalah juaranya, pemancing lain akan membayar ke pemancing yang mendapkan ikan terbanyak dan dari ikan tersebut akan dihitung jumlah nya misalkan saja pemancing tersebut mendapatkan ikan 20 ekor. dari pemancing yang 5 orang tersebut akan membayar kepada si pemancing yang menang dengan jumlah Rp.50.000 per ikan, jadi dari ke 5 pemancing ini akan membayar uang Rp.1000.000 per orangnya kepada si pemenang yang mendapat ikan terbanyak.

Dari observasi awal praktek Perjanjian (Akad) lahan pemancingan di Desa Kegeringan seperti halnya Pemancingan biasa, akan tetapi ketika mengamati lebih teliti maka akad yang dilakukan tersebut masih perlu dikaji bagaimana hukumnya. Selama ini penulis mengamati Perjanjian (Akad) baru kali ini penulis melihat praktek perjanjian yang demikian. Masalah tersebut memang jarang terjadi di Desa Kegeringsn Kecamatan Batu Brak kabupaten lampung Barat, maka penulis menganggap hal ini sangat penting untuk di bahas agar menambah pemahaman kepada kita mengenai upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan Perjajian yang terjadi di kolam pemancingan dengan sistem jackpot.

C. Pandangan Masyarakat Desa Kegeringan Terhadap Pemancingan Sistem Jackpot

Menurut Bapak Marwazi (pemancing) lahan pemancingan di desa kegeringan kecamatan batu brak kabupaten lampung barat , sistem jackpot yang ada di kolam pemancingan di desa kegeringan berbeda dari pemancingan lainnya, jackpot yang di maksud disini adalah bonus hadiah bagi pemancing di luar hadiah utama yang sudah di terapkan .¹¹

Menurut Bapak Edward (Pemilik Kolam) Pemancing yang ingin mendapatkan ikan dan uang taruhan maka ia harus mendaptkan jackpot tersebut, dengan cara memancing sendiri dengan ikan mas yang telah di lepaskan di kolam, berat dari ikan tersebut ialah 1kg per ikan nya dan barang siapa yang mendapatkan ikan terbanyak maka ialah yang berhak mendapatkan jackpot tersebut.¹²

¹¹Wawancara bapak marwazi pemancing sistem jackpot, pada tanggal 02 agustus 2018

¹²Wawancara bapak Edward pemilik kolam pemancingan sisgem jackpot , pada tanggal 02 agustus 2018

Menurut Bapak Tatang (pemancing) Jikalau pemancing mendapatkan ikan tetapi dia tidak mendapat ikan terbanyak maka pemancing tersebut tidak mendapatkan jackpot dan hanya membawa ikan hasil pancingan dan membayar Rp 50,000 per ikan nya terhadap pemancing yang menang.¹³

Menurut Bapak Totok (Pemancing) untuk hadiah jackpot sebenarnya di ambil dari harga ikan per ekornya ,biasanya berkisar Rp50,000 , maka taruhan jackpot tersebut Rp 50,000 . maka pemancing harus cukup banyak mengeluarkan uang untuk memancing dengan sistem jackpot ini.¹⁴

Menurut Bapak Bahrin (Penonton) Faktor yang melatar belakangi pemancingan tersebut ialah karna memancing dengan mudah karna ikan tersebut mudah di peroleh tergantung dari para memancing dalam membuat umpan nya , dan cara mudah untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras.¹⁵

¹³Wawancara Bapak Tatang Pemancing dengan Sistem Jackpot, pada tanggal 16 Agustus 2018

¹⁴Wawancara Bapak Totok Pemancing dengan Sistem Jackpot, pada tanggal 18 Agustus 2018

¹⁵Wawancara Bapak Bahrin Penonton pemancingan Sistem Jackpot , pada tanggal 18 Agustus 2018

Menurut Bapak Herli (Penonton) Menurut Bapak Herli Sistem Jackpot di kolam Pemancingan ini Setiap Hari nya tidak pernah sepi per hari nya bias sampai 5 orang bahkan sampai dengan 12 orang pemancing yang ingin melakukan judi pancing , entah dari desa mana saja mereka berasal ,mereka memancing karna bisa memabawa pulang ikan dan uang.¹⁶

Menurut Bapak Sutris (Warga) pemancingan jackpot tersebut meresahkan masyarakat karna adanya unsur perjudian di dalam nya , sehingga masyarakat tidak menyukai desa mereka dijadikan tempat berjudi. Sistem jackpot di kolam pemancingan ini dapat merugikan salah satu pihak.¹⁷

¹⁶WawancaraBapak Herli Penonton pemancingan Sistem Jackpot , pada tanggal 18 Agustus 2018

¹⁷Wawancara Bapak Bapak Sutris, Warga Desa kegeringan pada tanggal 20 Agustus 2018

BAB IV

ANALISA DATA

A. Unsur Judi Dalam Pemancingan Sistem Jackpot Di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Berak Kabupaten Lampung Barat

Setelah menganalisa data-data yang telah dikemukakan pada BAB III sebagai landasan teori, peneliti merasa adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi di tempat pemancingan tersebut. Bahwa praktek pemancingan sistemjackpot ini dilakukan oleh masyarakat terdapat pelanggaran dalam unsur perjanjian (akad) yaitu adanya unsur perjudian di dalamnya. Karena pelaksanaan perjanjian di pemancingan Desa Kegeringan Kabupaten Lampung Barat, jauh berbeda dengan pemancingan yang lainnya karena di pemancingan ini terdapat sistem jackpot, yang dimaksud dengan Sistem pemancingan jackpot adalah memperebutkan ikan yang di pancing dengan jumlah terbanyak guna nya untuk mendapatkan uang taruhan dan ikan yang diperoleh. Pemilik kolam pemancingan sistemjackpot tersebut hanya menjual ikan tersebut kepada para pemancing, setiap pemancing memiliki jatah 5 kg . dan dari 5 kg ikan berjumlah 5 ekor ikan , pemancing ada 6 orang dari setiap 6 orang tersebut akan di beri jatah 5 kg, mereka akan membayar ke pemilik kolam pemancingan sebesar Rp.250.000 per orang untuk membeli ikan tersebut.Kemudian ikan yang di beli 6 orang tersebut akan dilepas di kolam sebanyak 30 ekor. Pemancing 1 dan pemancing ikan lainnya akan berebut ikan tersebut. bagi yang mendapatkan ikan lebih banyak maka pemancing tersebut adalah juaranya, pemancing lain akan

membayar ke pemancing yang mendapatkan ikan terbanyak dan dari ikan tersebut akan di hitung jumlah nya misalkan saja pemancing tersebut mendapatkan ikan 20 ekor. dari pemancing yang 5 orang tersebut akan membayar kepada si pemancing yang menang dengan jumlah Rp.50.000 per ikan, jadi dari ke 5 pemancing ini akan membayar uang Rp.1000.000 per orang nya kepada si pemenang yang mendapat ikan terbanyak. Sistem pemancingan Jackpot sendiri adalah sarana untuk para pemancing mendapatkan uang dengan cara perjudian di kolam pemancingan, dengan melakukan perjanjian pemancing satu dan yang lainnya.

Faktor yang melatarbelakangi pratek Sistem Pemancingan Dengan Sistem Jackpot ini adalah karna hoby masyarakat, di pemancingan ini juga selain mendapatkan ikan bisa juga menghasilkan uang oleh karena itu masyarakat sangat tertarik untuk memancing di pemancingan dengan sistem jackpot di desa kegeringan kabupaten lampung barat.

Perartek perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kolam pemancingan dengan pemancing itu berdampak negatif bagi pemancing yang kalah karena pemancing yang kalah bisa jadi tidak mendapatkan ikan dan uang dengan bayaran yang mahal dengan demikian perjanjian yang harus dilakukan oleh pemilik kolam dan para pemancing tidak boleh merugikan satu belah pihak.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemancingan Sistem Jackpot Di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat

Untuk memberikan analisis terhadap perjanjian (akad) dengan sistem jackpot di kolam pemancingan di Desa Kegeringan Kabupaten Lampung Barat. Peneliti menghadapi perartek perjanjian dan maysir yang telah di bahas pada halaman sebelumnya yang telah di paparkan pada BAB II.

Akad perikatan, perjanjian dan permufakatan).Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul

Salah satu akad yang ditawarkan di pemancingan di Desa Kegeringan dengan sistem ini pemancing harus memancing ikan terlebihdahuludengan rentan waktu yang tidak ditentukan, dan telah disediakan jackpot dalam jumlah yang telah di sepakati oleh para pemancing yang berhasil memenangkan sistemjackpot tersebut.

Adapun rukun ketentuan HukumIslam di anggap sah apabila memenuhi syarat-syarat di antara nya adalah rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah

merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki haq (aqidashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain:

a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak Dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan

yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

- 2) *Mauqudala* ialah benda-benda yang diadakan.
- 3) *Maudhuala* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighatala* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighatal-aqd* ialah:

- a) *Sighatal-aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz. Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

Disamping yang telah di sebutkan di atas perjanjian (akad) mempunyai syarat-syarat tertentu, apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian (akad) menjadi tidak sah syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : Syarat akad adalah Setiap pembentuk akad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
- 4) Akad tidak dilarang oleh *syara'*.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- 7) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

Dengan demikian praktek pemancingan dengan sistem jackpot yang diterapkan belum sah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat sah perjanjian (akad) yakni diantaranya karena pemanfaatannya akad tersebut mengandung unsur *maysir*, di katakan maysir karena memperebutkan ikan terbanyak, Guna nya untuk mendapatkan uang taruhan tersebut.

Oleh karena itu, supaya transaksi tersebut sesuai dengan syariat islam, seharusnya pemilik kolam pemancingan tersebut membuat pemancingan tersebut akad nya sesuai dengan syariat islam, agar tidak terjadi kesalah pahaman yang terjadi dalam akad bermuamalah.

Illat ialah suatu sifat yang ada pada ashal (al-ashl) yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal (al-ashl) serta untuk

mengetahui hukum pada fara' (al-far') yang belum ditetapkan hukumnya, seperti menghabiskan harta anak yatim merupakan suatu sifat yang terdapat pada perbuatan memakan harta anak yatim yang menjadi dasar untuk menetapkan haramnya hukum menjual harta anak yatim.

Para ulama sepakat bahwa Allah SWT membentuk hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Kemaslahatan itu adakalanya dalam bentuk mengambil manfaat dan adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya. Kedua macam bentuk hukum itu merupakan tujuan terakhir dari pembentukan hukum yang disebut hikmah hukum.

Illat merupakan sifat keadaan yang melekat pada dan mendahului peristiwa/pebuatan hukum yang terjadi dan menjadi sebab hukum. Sedangkan hukmah adalah sebab positif dan hasil yang dirasakan kemudian setelah adanya peristiwa hukum. Sebagai contoh ialah: Seorang musafir boleh mengqashar shalatnya, seperti mengerjakan shalat Zhuhur yang empat raka'at menjadi dua

raka'at dan sebagainya. Hikmahnya ialah untuk menghilangkan masyaqqah (kesulitan) atau kemadharatan. Hikmah ini hanya merupakan dugaan saja dan tidak dapat dijadikan dasar atau tindakan hukum, sedangkan illat adalah suatu yang nyata dan pasti, seperti safar (dalam perjalanan). Illat adalah yang membatasi (mendefinisikan) hukum dan illat itu disebut hubungan hukum, sebabnya dan tandanya.

Menurut illat Hukum segala unsur permainan yang mengandung taruhan dengan sejumlah uang atau barang, yang bersifat untung untungan, dengan harapan menang sehingga mendapat keuntungan, dan apabila kalah uang atau barangnya menjadi hak milik pemenang permainan tersebut. Hal ini ialah termasuk judi. Oleh sebab itu penulis mengemukakan bahwa pemancingan sistem jackpot di desa kegeringan kecamatan batu brak kabupaten lampung barat terdapat unsur judi didalamnya.

Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT. Selain lebih banyak mudharat daripadamanfaatnya, perbuatan judidilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat. Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram, di mana pemain tidak lepas dari untung atau rugi. Dengan demikian, seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis dari data penelitian yang berhasil di himpun oleh peneliti maka dapat di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad pada pemancingan sistem jackpot di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat mengandung unsur judi. Sebab, bagi pemancing yang berhasil memperoleh ikan hasil pancingan terbanyak akan memperoleh uang dari pemancing yang lain (yang kalah), dengan perhitungan jumlah ikan yang diperoleh di kali Rp50.000/ekor. Setiap pemancing yang kalah di kenakan ketentuan yang sama.
2. Dalam perspektif Hukum Islam, pemancingan dengan sistem jackpot di Desa Kegeringan Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat haram hukumnya karena terdapat unsur perjudian di dalamnya.

Demikian yang dapat penulis jelaskan dalam skripsi ini semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua khususnya Penulis, masih banyak kekurangan dalam kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap ada kritik dan saran

yang sifatnya membangun, semoga Allah SWT memberkati kita semua amin.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat muslim khususnya penduduk desa kegeringan kecamatan batu brak kabupaten lampung barat, agar kembali dalam Hukum Islam dalam bermuamalah melakukan kegiatan Perjanjian (Akad) .
2. Kepada pemancing dalam bermuamalah, seharusnya transparan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, agar tidak menimbulkan konflik dan dapat menciptakan kemaslahatan, keharmonisan desa tersebut.
3. Kepada pemilik kolam agar sistem jackpot di kolam pemancingan tersebut akad nya di rubah sesuai syari'at islam dan tidak harus menggunakan unsur perjudian di dalamnya.
4. Kepada pemerintah agar menutup kolam pemancingan tersebut, karena di kolam tersebut proses transaksinya mengandung unsur perjudian di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007).
- Abul A'la Almaududi, "Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Bunyana solihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta, Total Media, 2016
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3*, (Surabaya: Arkola).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Diponogoro, 2014).
- Halim, *lajnah pentashihan mushaf al-quran dan terjemahan, kementerian agama RI*.
- H.E. Hassan Saleh Ed.1, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: UGM, 2002).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*.
- Muhammad Ibn al-Hasan al-Badakhshi, *Mana bijal-Uqul, Tercetak bersama nibayat al-Su'ud oleh Muhammad Ali Subaiah al-Asnawy, Jilid I*, (Cairo, 2006).

- Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*,
(Jakarta, Bulan Bintang, 2003).
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, (Jakarta:1991).
- Sahabuddin et al. *Ensiklopedia Al-quran: Kajian kosa kata*, Jakarta:Lentera hati, 2007.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,(Jakarta : PT Rajawali, 2010).
- Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Sohari, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- SuharsimiArikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT.Asdi Mahasatya, 2002).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2003).
- Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,(Jakarta : PT Rajawali, 2010).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979).
- Tim penyusun pusat kamus, *kamus besar bahasa indonesi* (kbbi).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010).
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010).